

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya energi dan mineral, baik berupa minyak dan gas bumi, tembaga, nikel, dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia akan sumber daya energi dan mineral terutama batubara mendorong munculnya investasi-investasi di bidang pertambangan batubara.

Pertambangan adalah kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, oleh karena itu lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif lain. Keberadaan bahan tambang secara alami banyak berada dalam kawasan yang masuk kriteria hutan.

Kegiatan pertambangan apapun jenisnya, menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, dampak besar dan penting (dampak negatif) terhadap lingkungan hidup yaitu pengubahan bentang lahan dan bentang alam; dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; dan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.

Terhadap dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan batubara, maka perusahaan pertambangan batubara diharuskan untuk melakukan kewajiban reklamasi. Upaya reklamasi selain bertujuan untuk mencegah erosi atau

mengurangi kecepatan aliran air limpasan, reklamasi dilakukan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif. Bentuk permukaan wilayah bekas tambang pada umumnya tidak teratur dan sebagian besar dapat berupa morfologi terjal. Pada saat reklamasi, lereng yang terlalu terjal dibentuk menjadi teras-teras yang disesuaikan dengan kelerengan yang ada, terutama untuk menjaga keamanan lereng tersebut.¹ Akhirnya reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.² Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, yang dimaksud Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan reklamasi ditujukan agar pembukaan lahan untuk pertambangan seoptimal mungkin, dan setelah digunakan segera dipulihkan fungsi lahannya. Reklamasi harus dilaksanakan secepatnya sesuai dengan kemajuan tambang. Reklamasi merupakan bagian dari skenario pemanfaatan lahan pasca tambang.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa “Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang KP diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya”.

Adapun peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan reklamasi bagi kegiatan pertambangan batubara, yaitu dalam Pasal 46 ayat (4) PP 75 Tahun

¹ www.JDHI.bpk.go.id, infokum2, Reklamasi dan Jaminan Reklamasi Pertambangan, 25 Juli 2008

² Herlina, Banjarmasin Post, Melongok Aktivitas Pertambangan Batubara Di Tabalong Reklamasi 100 Persen Mustahil, 17 September 2004.

2001 dinyatakan bahwa “ Sebelum meninggalkan bekas wilayah KP-nya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum”. Lebih lanjut ayat (5) menegaskan bahwa “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KP”. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Perusahaan wajib menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang. Hal ini lebih ditegaskan dalam ayat (2) yaitu Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, dan sebagai bagian dari studi kelayakan.

Penulis tertarik untuk mengangkat tema pelaksanaan tanggung jawab reklamasi bagi kegiatan pertambangan batubara dikarenakan sampai saat ini pemerintah dan beberapa perusahaan tambang belum dapat melaksanakan tanggung jawab reklamasi dengan baik. Kondisi ini juga tidak dibarengi dengan adanya penegakan hukum yang tegas, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab reklamasi dari segi kepatuhan terhadap undang-undang oleh pelaku kegiatan pertambangan batubara PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab reklamasi dari segi kepatuhan terhadap undang-undang oleh pelaku kegiatan pertambangan batubara PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan batubara PT.Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tanggung jawab reklamasi.
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal pelaksanaan regulasi yang baik berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab reklamasi.
3. Memberikan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertambangan pada khususnya yang menyangkut tentang pengaturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab reklamasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “ Pelaksanaan Tanggung Jawab Reklamasi Bagi Kegiatan Pertambangan Batubara “ menurut sepengetahuan penulis belum pernah ditulis sebelumnya. Oleh karena itu , penulis berani menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah karya asli penulis, dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya tulis atau penelitian lain. Apabila ternyata terdapat penelitian yang sama bukan merupakan kesengajaan, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau pembanding dari penelitian yang lain tersebut.

F. Batasan Konsep

Adapun yang menjadi batasan konsep atau pengertian istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menuntut hak.

2. Reklamasi

Reklamasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya.

3. Pertambangan

Pertambangan adalah usaha (kegiatan) penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.³

4. Batubara

Batubara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat/grade yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarsit.⁴

5. Kontrak Karya

Kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Berdasarkan proposal penelitian, penulisan hukum ini lebih khususnya merupakan penelitian Studi Kasus dimana

³ Salim, HS., 2005, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta, Rajawali, hlm. 7.

⁴ Ibid., hlm. 191.

peneliti memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi pada satu institusi atau kelembagaan saja (tidak harus ada persengketaan hukum).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Modal Asing.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
- 6) Kep Dirjen PU No.336/1996, tentang Jaminan Reklamasi.

Bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia.
- 2) Hukum Pertambangan.
- 3) Hukum Pertambangan Di Indonesia.
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 5) Banjarmasin Post tanggal 17 September 2004

3. Metode Pengumpulan Data

Yang penulis pergunakan dalam memperoleh data yaitu dengan :

- a) Wawancara : pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan mengadakan tanya jawab antara peneliti dengan responden dan nara sumber.
- b) Studi Kepustakaan : pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

5. Responden dan / atau nara sumber

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sebagai berikut :

- a) Environment Reclamation Section Head PT Adaro Indonesia
- b) Environment Compliance Section Head PT Adaro Indonesia.

Dalam penelitian ini yang menjadi nara sumber adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas Pertambangan di Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan.
- b) Kepala Dinas Pertambangan di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan.

6. Metode analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh akan dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti.

Selanjutnya diambil kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kepada pengetahuan yang bersifat khusus.